

BAB III

PROPAGANDA BARAT SEBAGAI ALAT MEDIA MASSA DALAM MEMBERIKAN PENCITRAAN NEGATIVE TERHADAP DUNIA ISLAM

Bab III membahas tentang paradigma Propaganda. Secara keseluruhan bab ini menceritakan mengenai Propaganda Barat sebagai alat Media Massa dalam memberikan Pencitraan Negative terhadap Dunia Islam.

A. Popaganda Paradigma Media Antara Realitas Sosial Dan Konstruksi Sosial

Media komunikasi merupakan masalah yang selama ini selalu timbul kepermukaan dalam kondisi sosial dan politik. Hakikat media dan politik tercermin sebagai peran yang anpuh dalam merefleksikan tentang fenomena sosial kemanusiaan. Namun banyak hal yang di lihat ketika mengalami perubahan bentuk secara teoritisasi akademis dan praksis atas dasar perspektif memihak dan netral terhadap fenomena sosial politik. Kita juga sering di bingungkan oleh sebuah opini yang melebar dan sempit dengan hanya melakukan pemaknaan terhadap eksistensi media sebagai pilar substansi dari bangunan besar sosial kemasyarakatan dalam proses demokrasi. Selama ini kita melihat pondasi pemikiran lahirnya media yang sesungguhnya bias dan sering muncul sebagai inferiority terhadap kepuasan individu yang menjadikan media sebagai alat (media game). Persoalan metodologis dalam pengertian politik kebangsaan, justru sangat terkait dengan perkembangan kajian-kajian realitas dalam konteks membangun respon sosial politik dan ekonomi.

Tuntutan adanya pragmatisme kelompok media merupakan kesalahan terbesar untuk menjawab berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri .yang menjadi haknya.

Dinamika demokrasi yang di dalamnya berperan masyarakat dan struktur kekuatan media yang merupakan indikator dari asas keterbukaan informasi yang mencoba menyatukan sisi positif dan negatif dari setiap perubahan bangsa itu. Daripada itu juga, banyak sisi yang harus dipola sebagai mediator dari sebuah tuntutan tentang perlunya reorientasi dan restrukturisasi bangunan metodologis media sebagai basis pembentukan politik value dan adab negarawan dalam proses berkebangsaan. Kajian politik kebangsaan dalam perspektif media ini tentu atas dasar berbagai pandang-pandangan baru (*news inspiration*) sebagai kekayaan analisis atas berbagai dimensi dan hubungan-hubungan sosial yang tak mampu diungkap melalui pendekatan sebelumnya. Tahun 1998 merupakan tahun awal mulanya keluarnya penyalahgunaan kekuasaan akan nilai-nilai keragaman dan keberpihakan penguasa kepada rakyat, sehingga momentum ketidakberpihakan itu kembali ternyata menyulut api perubahan yang di kehendaki. Namun akibat perubahan tersebut, justru hampir mencapai titik puncak tentang sebuah ilusi dan kesenjangan antara fakta politik dengan realitas, itulah fakta sosial yang carut marut pada dewasa ini. Pendekatan politik kebangsaan yang sebelum memiliki kekuatan nilai menjadi sesuatu yang asing bagi kita. Padahal politik dan perangkat media adalah pilar yang tidak bisa di abaikan dengan cara apapun.

Dalam sistem demokrasi sekarang ini, tentu kecenderungan aspek normative yang di jalankan belumlah menjadi bagian yang terkonsolidasikan dengan baik sebagai bagian dari penanaman aktualisasi nilai-nilai politik kebangsaannya. Kebanyakan penerapan sistem demokrasi yang kita saksikan bersama, juga melakukan marginalisasi putusan politik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara epistemologis. Sehingga berakibat pada dunia politik kebangsaan yang suram, tanpa praksis politik nilai yang ditampilkan. Sementara isu-isu aktual dewasa ini mengalami peningkatan dengan mobilitas sosial cukup meninggi juga dengan kesadaran kultural dan kebutuhan ekonomi. Suara-suara penyelewengan atas pemaknaan terhadap politik demokrasi menjadi corong perpecahan dalam struktural Negara dan membentuk kekuatan siluman yang terkotak-kotak sebagai komponen perwakilan masyarakat klasik homogen dan modern heterogen.

Oleh karena itu, pluralitas media dalam pembentukan karakter sosial sangat di harapkan dan dijadikan pondasi untuk konstruksi sosial masyarakat. Meningkatnya media komunikasi telah menjadikan proses berinteraksi semakin kuat tanpa tapal batas, baik antar budaya maupun sisi politik. Media sudah menjadi faktor utama yang harus di konsumsi setiap hari oleh umat manusia saat ini, bahwa pengungkapan atas ketidakadilan merupakan kewajiban yang tak terukur oleh masyarakat. Sehingga media dalam konsep ontologisepistemologis dan praksis sebagai bentuk fenomena sosial merupakan sebuah rekayasa yang menjadi pilar pembangunan nilai-nilai kebangsaan yang satu. Maka sebaiknya media dewasa ini harus memiliki dua aspek yakni pertama, aspek *media transendenstal* sebagai kerangka normatif dari berbagai

doktrin untuk memahami bagaimana eksistensi manusia dan konstruksi sosial kemasyarakatan untuk menghargai pluralitas budaya atau pluralitas struktural yang tidak terjebak dalam politik kebangsaan yang tercerabut dari akarnya yang di sebabkan oleh krisis nilai. Media perspektif transcendental ini dapat menembsbus dan mengelaborasi tentang sebuah perbedaan tanpa kehilangan daya pengarah untuk menuju perdamaian universal. Inilah tugas penting media sebagai juru damai makmur sejahtera. Kedua, *media humanitas* merupakan hasil atau buah pemikiran yang muncul dari refleksi yang luas tentang hakikat pengetahuan, struktur sosial, dan konstruksi sosial. Karena memang media merupakan kebutuhan epistemologis dan etis bagi adanya komitmen untuk tetap berada dalam kontrol kritis sehingga kemunculan refleksitas keyakinan pribadi dan sosialnya menjadi faktor aktualisasi nilai-nilai dan sistem kebangsaan kita.²⁵ Problem besar masyarakat modern adalah soal metode merekonstruksi struktur sosial dalam konteks *pengakuan* dan *legalitas*. Sehingga medium sosial sebagai falsafah media komunikasi secara otonom yang terlepas dari kepentingan golongan, etnik, dan ras dengan tujuan memberikan kemerdekaan penuh pada prinsip dan nilai-nilai kebangsaan. Tindakan komunikatif yang bertujuan untuk meraih pemahaman.

Dalam konteks Dunia Islam, media telah lama melakukan pembongkaran terhadap struktur sosial, apalagi dalam konteks masyarakat klasik yang beranggapan pada posisi tereksplorasi dan masyarakat modern yang berpandangan sebagai sisi kemenangan. Maka hal ini tentu sangat mengecewakan bagi masyarakat klasik,

²⁵<http://Hudistemplate.blogspot.com/2012/11/Yang-Kritis-Aspek-Media-Sosial.html> diakses pada 28 Februari 2013

sehingga ada sentimental dengan melakukan pembongkaran terhadap struktur masyarakat modern yang terintegrasi kedalam satu prinsip nilai. Jika pada saat yang sama resiko pertikaian bertumbuh, khususnya dalam ruang-ruang tindakan komunikatif yang telah putus ikatan dengan otoritas suci dan lepas dari ikatan-ikatan lembaga kuno. Asumsi utama dalam kajian demokratisasi adalah semakin *press independent* dengan semakin besar kebebasan yang dimiliki maka akan memberi kontribusi positif pada perubahan politik, mendukung transisi demokrasi dan meruntuhkan rejim yang otoritarian. Tradisi kritik media dan peran politik media dalam arus kebangsaan telah muncul sejak lama dengan melakukan pengkritisan terhadap kekuasaan melalui berbagai terbitan media politik sebagai alat perjuangan dengan mengajarkan bahwa produksi-produksi dalam masyarakat bersifat independen dan sesungguhnya masyarakat yang menentukan. Namun dari sisi lainnya bahwa kebebasan pers dan politik media menjadi bagian penting dalam pembangunan sejarah kebangsaan secara alami, karena dalam perspektif kebangsaan banyak hal yang menjadi bangunan politik media yakni termasuk perjuangan – perjuangan oposisi sebagai manifestasi control dalam kekuasaan dan selalu berdialektika yang menghasilkan nilai-nilai sosial kebangsaan yang tinggi.

B. Propaganda Barat Terhadap Islam Selama Ini

1. Dominasi Barat

Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan memengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda.

Sebagai komunikasi satu ke banyak orang (*one-to-many*), propaganda memisahkan komunikator dari komunikannya. Namun komunikator dalam propaganda sebenarnya merupakan wakil dari organisasi yang berusaha melakukan pengontrolan terhadap masyarakat komunikannya. Sehingga dapat disimpulkan, komunikator dalam propaganda adalah seorang atau kelompok yang ahli dalam teknik penguasaan atau kontrol sosial. Dengan berbagai macam teknis, setiap penguasa negara atau yang bercita-cita menjadi penguasa negara harus mempergunakan propaganda sebagai suatu mekanisme alat kontrol sosial.²⁶

Propagandis mencoba untuk mengarahkan opini publik untuk mengubah tindakan dan harapan dari target individu. Yang membedakan propaganda dari bentuk-bentuk lain dari rekomendasi adalah kemauan dari propagandis untuk membentuk pengetahuan dari orang-orang dengan cara apapun yang pengalihan atau kebingungan.

Propaganda adalah senjata yang ampuh untuk merendahkan musuh dan menghasut kebencian terhadap kelompok tertentu, mengendalikan representasi bahwa itu adalah pendapat dimanipulasi. Metode propaganda termasuk kegagalan untuk tuduhan palsu.

Kita bisa katakan propaganda media massa ini sebagai propaganda putih, dilihat dari caranya yang secara terbuka mendeklarasikan perang ideologi terhadap terorisme melalui media massa. Media massa menjadi satu-satunya cara yang praktis

²⁶<http://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda>. diakses pada 20 Februari 2013

untuk menyebarkan pesan-pesan dan menjadi pembawa propaganda baru sejalan dengan perkembangannya.

Hubungan Islam dengan Barat dalam sejarah panjangnya diwarnai dengan fenomena kerjasama dan konflik. Kerjasama Islam dan Barat paling tidak ditandai dengan proses modernisasi dunia Islam yang sedikit banyak telah merubah wajah tradisional Islam menjadi lebih adaptatif terhadap modernitas. Akan tetapi sejak abad ke-19, tema yang menonjol dalam relasi antara Islam dan Barat adalah konflik.²⁷ Ketimbang memunculkan kemitraan, relasi Islam dan Barat menggambarkan dominasi subordinasi.

Pasang surut hubungan Islam dan Barat adalah fenomena sejarah yang perlu diletakkan dalam kerangka kajian kritis historis untuk mencari sebab-sebab pasang surut hubungan itu dan secepatnya dicari solusi yang tepat untuk membangun hubungan tanpa dominasi dan konflik di masa-masa mendatang. Barat selama ini dicurigai sebagai pihak yang telah memaksakan agenda-agenda "pembaratan" di dunia Islam dalam rangka mengukuhkan hegemoni globalnya. Dampak yang ditimbulkan dari hegemoni global Barat adalah semakin terpinggirkannya peran ekonomi, politik, sosial dan budaya Islam dalam panggung sejarah peradaban dunia.

Tidak hanya itu, Islam semakin tersudut dengan berbagai cap yang dilontarkan Barat terhadap Islam, mulai dari cap fundamentalis sampai teroris. Tentunya berbagai cap itu terselubung kepentingan tingkat tinggi (*high interest*)

²⁷<http://Hasan-ok.blogspot.com/2012/11/Islam-dan-Barat-Akomodasi-dan-Konflik.html> diakses pada 18 Maret 2013

untuk membuat semakin terpojoknya Islam sehingga mudah untuk dijinakkan demi kepentingan globalnya, sebagai bentuk Hegemoni Barat terhadap Dunia Islam.²⁸

2. Respon Muslim Terhadap Barat

Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik, realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, dimana Dunia Islam dan Muslim seluruh dunia adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin lebar antara kelompok dominan dan yang didominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi atas dua kelompok itu, di mana kelompok dominan sebagai *the first class*, bisa berbuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi. Jalan keluar dari kemelut ini ada dua yang ditawarkan beberapa kalangan, dialog atau melawan hegemoni.

Dialog adalah model penyelesaian yang dinilai paling sedikit menanggung resiko. Dialog ini mengasumsikan antara pihak yang terlibat konflik (Barat dan Dunia Islam) berada dalam posisi yang sejajar untuk mau saling mengerti satu sama lain. Negara-negara Barat harus mau mengakhiri sikap imperialis dan mulai membangun relasi setara dan bersahabat. Kerjasama dan partisipasi hanya akan bermakna bila didasarkan keseimbangan kepentingan dan bebas dari hegemoni.

Orang yang mengidealkan cara dialog untuk menyelesaikan konflik peradaban atau kepentingan mungkin lupa bahwa syahwat hegemoni Barat adalah sesuatu yang sudah laten dalam tradisi relasi Barat dan Dunia Islam. Keinginan untuk mengajak

²⁸<http://cgeduntuksemua.blogspot.com/2011/11/Pasang-Surut-Hubungan-Islam.html> diakses pada 18 Maret 2013

Barat bersikap lebih adil adalah utopia di tengah nafsu serakah Barat yang ingin menguasai dunia.

Setelah cara dialog adalah model utopis, maka jalan lain yang tidak boleh dihindari oleh Dunia Islam (orientalism atau Muslim) adalah melawan hegemoni itu dengan potensi kekuatan yang ada. Cara melawan hegemoni yang paling fundamental adalah bersikap kritis terhadap berbagai pengetahuan yang dikembangkan oleh dan untuk kepentingan Barat. Sikap yang terlalu adaptatif umat Islam Islam terhadap yang datang dari Barat hanya akan semakin mengukuhkan hegemoni Barat di dunia Muslim.²⁹ Umat Islam yang secara sukarela belajar demokrasi, lalu mengintegrasikan dalam ajaran Islam dan menerapkan dalam kehidupan politik adalah salah satu bentuk menerima untuk dijajah. Belum lagi ketika belajar dan menerima peradaban, modernitas, dan *civil society* hampir tanpa *reserve*. Padahal menurut James Petras dan Henry Veltmeyer,³⁰ wacana tentang itu semua sesungguhnya dipakai untuk melegitimasi perbudakan, genocide, kolonialisme, dan semua bentuk eksploitasi terhadap manusia.

Sudah saatnya kaum Muslim di negara-negara berkembang bersikap kritis untuk melawan wacana global yang diproduksi Barat. Termasuk wacana globalisasi yang selama ini diterima sebagai sesuatu yang niscaya, harus dikritisi karena tersembunyi sebuah ideologi (*hidden ideology*) yakni neo-liberalisme yang dampaknya terhadap pembunuhan ekonomi rakyat sangat luar biasa. Dengan cara mempengaruhinya penindasan terhadap ideology umat islam melalui Film the

²⁹<http://islamicreform.blogspot.com/2007/07/Dunia-Islam.html> diakses pada 28 Mei 2013

³⁰<http://kismandompou.blogspot.com/2012/11/Dominasi-Barat-dan-Respon-Umat-Islam.html> diakses pada 28 Mei 2013

Innocence of Muslim tersebut sehingga dapat melemahkan perspektif dan keyakinan yang kuat terhadap agama umat muslim itu sendiri dan mudah untuk dipengaruhi sehingga pro dengan Barat.

C. Media, Propaganda dan Masyarakat

Akar politik kolonisasi sebenarnya adalah pada sistem kekuasaan terhadap media. Yang berperan mengamankan segala kepentingannya baik kepentingan kekuasaan maupun pengusaha. Politik kolonisasi ini tentu memiliki efek-efek yang relative merusak pada struktur sosial masyarakat klasik sebagai bagian dari eksploitatif adalah pola media komunikasi. Media dalam kategori ini tentu sangat pendek, pragmatism, kaku, miskin, dan tidak bervisi sama sekali tentang perjuangan hidup. Bagaimanapun, sekalipun kolonisasi semakin meluas, dunia-hidup terus berlanjut. Kolonisasi dalam system demikian dapat sebagai bentuk marginalisasi terhadap *visi informal* dan *orientasi formal* masyarakat terutama masyarakat klasik, Seharusnya watak media bukanlah kolonisasi, akan tetapi kolektifitas publik sebagai pemilik dengan konsekwensi melakukan pembangunan kekuatan politik kebangsaan. Sistem dan strukturnya perlu diikuti dengan tumbuhnya keanekaragaman tanpa ada kompleksitas diantara satu sama lainnya. Free media komunikasi merupakan satu argumentasi yang terus menerus di pelihara untuk mendapatkan posisi tawar akan makna kemerdekaan suatu bangsa. Rasionalisasi sistem media komunikasi akan mempertinggi bobot kesadaran ketika sedang berada dalam keragaman dan multikultur, yang apabila media yang mensyaratkan pesan (*communicant*) dalam rangka untuk memahami cara-cara perasionalisasian terhadap sistem. Sebagaimana

sekarang bahwa fakta kita temukan dalam sebuah bangsa yang besar, namun dalam pembangunan system mengalami kegagalan dan membuat cacat generasinya. Sehingga politik kebangsaan kita berada pada ujung tanduk, sedikit lagi di geser maka akan terjun kejurang pemisah antara sejahtera dan melarat. Kolonisasi media terpengaruh oleh kekuatan modal yang tak terhingga adanya, sehingga penanaman nilai-nilai kebangsaan hampir punah dan lumpuh total. Kepemilikan media justru di harapkan dan di arahkan pada diskriminasi akan eksistensi masyarakat klasik.³¹

Paradigma media yang memberikan efek positif dan negatif terhadap politik kebangsaan dengan model filterisasi terhadap kepentingan atas agenda-agenda persaingan politik kekuasaan. Kenyataan bahwa eksistensi media dan proses komunikasi terkadang berada di bawah pengawasan ketat pemerintah, apalagi dominasi penguasa atas seluruh asset maupun infrastruktur media. Namun dalam perubahan 1998 yang lalu, membawa angin segar bagi tumbuhnya media yang sampai sekarang ini mencapai 1.045 baik elektronik maupun cetak.³² Jumlah ini sangat fantastis untuk menjangkau seluruh aktivitas masyarakat dan Negara dengan kadar akses informasi yang sangat tinggi. Tentu aksesibilitas ini juga memiliki kekuatan yang riil untuk melakukan investigasi dan pencitraan baik secara perorangan maupun kelompok terhadap seluruh aktivitas bangsa dan politik. Ada banyak maksud media menjadi central dalam masa sekarang ini, karena media dan proses komunikasi itu sudah tidak mengenal tapal batas antara komunitas satu dengan

³¹<http://deffenes-lab.blogspot.com/2013/01/Media-Massa-Sebagai-Alat-Propaganda.html> diakses pada 28 Februari 2013

³²<http://sekaringsamudro.wordpress.com/2012/10/19/Opini-Publik-Propaganda-dan-Media-Massa/> diakses pada 28 Februari 2013

lainnya dan Negara satu dengan lainnya. Hal ini media di jadikan sebagai bagian dari perlawanan dalam perspektif pembangunan kesadaran yang tidak terjebak pada polarisasi kekuasaan yang bisa mengakibatkan perpecahan antar manusia satu dengan lainnya. Akan tetapi dominasi-dominasi para birokrat dan pengusaha dalam medium komunikasi dan media sekarang ini menjadi sangat kental serta media itu sendiri berubah menjadi lahan akses industri bisnis, tidak lagi berfikir untuk menjadikan media itu sebagai alternatif dan melakukan perumusan terhadap nilai-nilai kebersamaan dan kebangsaan.

Tujuan media harus mempunyai hak indefendensi yang kuat dan tidak bisa melakukan hegemoni terhadap satu pihak, justru media itu laboratorium politik kebangsaan yang bisa meretas radikalisasi dalam perspektif keyakinan dan ideologi. untuk pembelajaran politik dalam konteks mengapolitisasi ataupun mempolitisasi warga negara. Media menjadi perpanjangan tangan kepentingan penguasa dan bisa juga untuk lawan politik, bahasa politik bermakna ganda untuk tujuan penghalusan maupun untuk kepentingan memperdayakan warga negara, keduanya adalah bagian dari politik hegemoni sebagai syarat untuk mengukuhkan kuasa penguasa. Kuasa bahasa melalui penggunaan media menjadi pilihan politiknya. Bahasa yang bermakna ganda yang hampir menguasai isi media massa menjadi alat meminggirkan dan mengapolitisasi warga untuk menjauh dari arena politik formal dan mempolitisasi media sebagai ajang pengkritisan terhadap penguasa dengan berharap imbalan *material statemen* maupun jabatan yang ingin di capai. Dengan tujuan melestarikan kuasa dari elite politik (pemegang kuasa). Perlawanan-perlawanan politik warga

untuk menyuarakan aspirasi politiknya tetap tak merubah kondisi sistem politik represif saat ini. Secara fenomenologis dalam kultur komunikasi bahwa ternyata dalam era transisi saat ini media memiliki ruang yang lebih besar untuk melakukan eksperimentasi politik maupun bisnis. Tetapi dibalik itu semua, ada keunikannya. Karena sistem politik Indonesia berada dalam pusaran globalisasi, eksistensi media tak luput dari apa yang ada dalam pendirian kaum hegemonian, menempatkan kebudayaan global yang bersifat tunggal sebagai watak kapitalisme yang monolitik (struktur modal kapitalistik), sehingga seluruh ekspresi kebudayaan termasuk ekspresi simboliknya mengacu pada ekspresi dominan atas nama pasar, dan media tidak berfungsi sebagai representasi maupun rekonstruksi realitas sosial politik, melainkan lebih dari itu. Asumsi yang mendasari adalah, *pertama* media adalah sebuah institusi dan aktor politik yang memiliki hak-hak. *Kedua*, media dapat memainkan berbagai peran politik, diantaranya mendukung proses transisi demokrasi, dan melakukan oposisi. Sebagaimana disinyalir oleh Cook, bahwa hal ini telah menjadi perhatian penting pada masyarakat Barat, di mana para jurnalis telah berhasil mendorong masyarakat untuk tidak melihat mereka sebagai aktor politik, sedangkan para pakar politik juga telah gagal untuk mengenali media sebagai sebuah institusi politik. Dalam ruang lingkup medium sosial kepercayaan terhadap kekuatan media menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan politik.

Media merupakan sebuah komponen istilah yang telah di akses oleh seluruh masyarakat dunia semenjak masa-masa sebelum hijriyah (SH). Media dan proses demokrasi merupakan bahasa yang sudah dikenal oleh dunia sejak ribuan tahun yang

lalu. Media dan demokrasi ini yang dipakai oleh berbagai Negara di belahan dunia ini yang berusaha mempraksiskan bahasa tersebut baik dalam sisi pemerintahan maupun penerapan – penerapan system kekuasaan Negara tersebut. Media dalam sebuah proses berdemokrasi merupakan pilar utama untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan rakyat secara bebas dan tanpa ada diskriminasi. Mengutip Beitz dan Azra mengatakan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk *Nations State* yang menghormati kesamaan dan kedaulatan warganya. Indikator kehidupan demokrasi adalah dengan keleluasaan penduduk untuk menyampaikan pendapat melalui berbagai media secara bebas. Kebebasan melalui media ini memang sudah merupakan suatu hal yang wajar di negara-negara yang menganut paham demokrasi seperti Media Massa Barat

Gutenberg dengan penemuan mesin cetaknya dalam suatu perkembangan yang lama menjadikan suatu bahan tertulis/tercetak dibaca orang dalam waktu yang bersamaan. Kesamaan bahan bacaan, dan mungkin lama-lama kesamaan kognitif, menyebabkan munculnya persepsi yang sama tentang suatu issue, dan ini mengarah kepada kesamaan opini. Adanya bahan bacaan membuat kesamaan opini menjadi munculnya persamaan pengetahuan. Pengetahuan kemudian perlu di cocokkan dengan kenyataan di dunia nyata, maka bekembanglah filsafat dan ilmu pengetahuan yang merupakan upaya mencari kebenaran berbagai fenomena dalam kehidupan manusia. Mesin cetak memungkinkan dibuat banyak barang cetakan seperti buku dan surat kabar, dan dibaca banyak orang yang bisa memicu adanya opini public dan berbagai inovasi. Perkembangan iptek, menyebabkan munculnya berbagai penemuan yang mengarahkan adanya perkembangan peradaban manusia. Berbagai temuan dan

inovasi yang muncul dari banyak pemikir/innovator muncul berbagai penemuan. Salah satu penemuan yang sangat merubah perkembangan peradaban manusia adalah ditemukan berbagai inovasi di bidang teknologi komunikasi. Sebut saja telepon, telegraf, Marconi, radio dan media massa seperti bioskop, televisi dan lainnya yang kemudian menjadi pemicu perkembangan peradaban manusia.

Teknologi komunikasi itu selalu mengalami perkembangan kearah makin lama makin canggih. Media massa dan teknologi informasi ternyata telah berperan dalam menyebarkan virus propaganda dalam masyarakat. Media merupakan alat yang tepat untuk memperluas konsep propaganda kepada masyarakat sebagai sebuah paradigm ideologi. Pertama, media dapat menjangkau sasaran yang luas dalam waktu bersamaan. Dan yang kedua, mereka yang mengikuti media tidak mengenal satu sama lain dan itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengikuti media tanpa diawasi oleh orang lain. Beberapa pendapat dalam teori kritis bahwa media sebagai medium yang memiliki kekuatan tindakan sosial dengan fokus pada pewacanaan dan teks-teks yang mempromosikan sebuah ideology tertentu, membentuk dan mempertahankan kekuatan dengan meruntuhkan minat-minat kelompok atau kelas.

Media massa tidak lagi mengulangi berbagai kesalahan dengan melakukan afirmasi politik pada momen membesar-besarkan berita politik di negaranya atau bahkan dijadikan alat propaganda terhadap suatu kelompok atau Negara lain, karena hal itu dapat menciderai konsep media itu sendiri. Apabila media tidak memiliki independensi maka tentu pelajaran pahit yang didapatkan karena pembentukan opini dan citra oleh media, apalagi yang di promosikan tidak sesuai dengan kepribadian.

Hal ini akan mempengaruhi tatanan sosial masyarakat. Konteks ini media lebih jernih dalam memperkenalkan segala programnya yang menyangkut moralitas, kredibilitas, dan integritas. Jangan sampai media terlibat menjual musang berbulu domba. Demi bangsa ini bila perlu semua media melakukan analisis secara fair tentang keinginan masyarakat. sembari membenahi sistem kenegaraan, maka terobosan pertama yang harus segera dilakukan menemukan peranan pers yang bermoral dan bertanggungjawab pada bangsanya, Pengaruh media, terutama media televisi, sangat besar terhadap pembentukan opini akan karakter kebangsaan ditengah membelitnya persoalan bangsa. Karena itulah, media merupakan salah satu pilar demokrasi. Media memiliki andil terhadap kesemrawutan bangsa karena turut membentuk kepribadian masyarakat yang berkualitas. Kita harus mengakui secara fair bahwa media ikut bertanggung jawab atas carut marut amburadul ketegangan antara Barat dan Dunia Islam, kenyataan sekarang ini justru media kerap kali terlibat dalam merusak tatanan keseimbangan politik kebangsaan yang membuat masyarakat bingung. Merespon perkembangan pesat media.

Kepercayaan publik pada media, dinilai kian partisan dan berpihak pada kepentingan pemilik media, semakin berkurang. Pemusatan kepemilikan media di tangan sejumlah konglomerat yang memiliki agenda politik tertentu makin memperburuk keadaan, dan seolah membenarkan persepsi publik yang kian kritis mempertanyakan imparialitas wartawan. Pelanggaran aturan soal pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran seperti diatur dalam Undang-Undang Penyiaran terjadi secara kasat mata. Seolah berlaku hukum rimba di industri media: *siapa kuat,*

dia menang. Konsumen media tentu tidak buta dan tuli ketika disugahi santapan informasi, pembaca dan pemirsa media dituntut untuk memiliki perspektif lebih tajam lagi untuk mengantisipasi agenda atau muatan politik tertentu di balik sebuah pemberitaan media.

Di sisi lain, publik cenderung menggeneralisasi, menganggap semua media memiliki agenda yang sama. Karena memang media merupakan alat utama untuk menyampaikan hasrat dan posisi media kian meluas jaringannya. Media berperan menginformasikan kejadian yang ada di dunia ini, mereka harus bertanggungjawab dalam penyajian berita ketika penyajian tersebut salah dan bersifat propaganda ataupun rekayasa, Selain itu, media tidak hanya mementingkan kepentingan pemilik dan penanam modalnya. Akan tetapi media adalah corong bangsa, utamakan informasi, harus bersifat independen dan demokratis.

Bila media-media yang timbul hanya berdasarkan kepentingan para owner-nya saja dan hanya dijadikan alat untuk mengeruk kepentingan pribadi, sudah jelas masyarakat ditipu dengan rekayasa berita yang disajikan. Media saat ini sudah tidak lagi mengedepankan demokrasi dan independensi terhadap masyarakat, melainkan lebih mengedepankan kepentingan dan keuntungan para owner-nya. Apalagi, banyak media yang berperang dalam menyajikan berita terkait kepentingan politik. Media dan insan pers seharusnya mengedepankan independensi dalam menyajikan berita, jangan hanya berpikir akan kepentingan pribadi, Menurutnya, sebagian besar media-media yang baru tumbuh, tidak menjalani sepenuhnya kode etik. Jika terus media dijadikan alat untuk perang politik atau kepentingan pribadi, kasihan masyarakat yang

membaca rekayasa berita, Benturan antara etika dan kepentingan bisnis kerap memunculkan berbagai persoalan dalam dunia pers. Akan tetapi, persoalan-persoalan seperti dumping, monopoli, dan persaingan usaha belum mendapat perhatian memadai dan belum memberikan perhatian dalam menangani persoalan-persoalan pers. Penyebabnya adalah minimnya laporan dari dunia pers sendiri, itu berarti menandakan dunia pers belum menganggapnya sebagai hal utama yang harus dikendalikan. Selain itu juga, pengawasan untuk pers, mengingatkan agar kalangan perusahaan pers tetap menjamin keberlangsungan etika pers, dalam menjalankan bisnis. Bahkan etika perlu lebih ditekankan.

D. Propaganda Dalam Perspektif Media Massa Barat

Media dapat memainkan peranan yang sangat besar khususnya pada saat babak politik dalam transisi, karena media dapat bertindak sebagai agen perubahan. Neuman menjelaskan bahwa kebebasan memegang peranan penting, khususnya dalam proses liberalisasi politik yang berhubungan dengan munculnya pers (media) yang lebih terbuka dan kritis, Lalu, apa fungsi yang ditunjukkan oleh media sebagai institusi politik? Mempromosikan ideologi nasional dan melegitimasi proses pembangunan dalam menjalankan fungsi kekuasaan, pers adalah sebagai sebuah agen stabilitas, yang bertugas membantu melestarikan tatanan sosial politik. Fungsi ini umumnya berkaitan dengan istilah *development journalism*. Fungsi kedua adalah memonitor tatanan politik pada masa damai, melakukan *checks and balances*.

Cook (1998:4)³³ mengemukakan beberapa hal yakni *Pertama*, para jurnalis telah bekerja keras untuk mendorong masyarakat agar tidak berpikir bahwa mereka (jurnalis) merupakan aktor politik. Mereka sangat berhasil dalam upaya ini, sehingga mereka pun sepertinya sangat yakin dengan hal ini. *Kedua*, studi mengenai komunikasi politik berkembang di tengah-tengah sebuah tradisi yang menekankan efek media, dan disiplin ilmu yang terkait dengan studi politik tentang media berita pun telah pula menyembunyikan implikasi dari kegiatan mereka. Pada umumnya, ketika pakar politik merasa nyaman dengan melihat kontribusi politik dari media, maka mereka menjadi kurang memiliki keinginan untuk melihat media berita sebagai sebuah institusi. Dengan kata lain, para jurnalis telah berhasil untuk meyakinkan kalangan akademisi, bahwa mereka bukan aktor politik, dan para peneliti yang membahas tentang studi politik maupun media telah melalaikan hal ini. Fungsi *ketiga* adalah sebagai *fire-fighting*, yaitu membantu dalam menentukan hasil dari perubahan politik dan sosial dramatik yang terjadi saat krisis.. Dalam fungsi ketiga ini, pers merupakan agen perubahan (*agent of change*).

Tiga model agen alternatif ini adalah stabilitas, pengendalian dan perubahan merupakan fungsi yang mungkin dapat diperankan oleh pers sebagai institusi politik. Ini dapat memunculkan asumsi bahwa bahwa pers menampilkan peran politik yang spesifik dalam masyarakat tertentu pada suatu titik waktu tertentu pula, misalnya sebagai agen stabilitas dalam rezim otoriter. sebagai agen pengendali dalam demokrasi liberal dan agen perubahan dalam masyarakat di saat terjadinya transisi

³³<http://intranet.yorks.ac.uk/potter/cook98.htm> diakses pada 28 Februari 2013

politik. Namun dalam prakteknya, pers bersifat polivalen, dan dapat saja mengadopsi berbagai model agen secara simultan. Bagian -bagian dari pers yang berbeda, sangat mungkin untuk memberi dukungan, memarahi, atau mencela para pemegang kekuasaan pada saat yang bersamaan. Suatu publikasi tunggal pun dapat menjadi polivalen, misalnya kolumnis dan jurnalis yang berbeda dapat menerapkan bentuk agen politik yang berbeda, halaman depan yang memuat kritisi mengindikasikan bahwa publikasi ini dimaksudkan untuk mengendalikan pemegang kekuasaan tertentu, sedangkan bagian editorial menampakkan dukungan halus mereka, serta kolumnis yang agresif meminta pengunduran diri pihak penguasa. Mengevaluasi sikap dari peran politik yang ditampilkan oleh pers dalam situasi tertentu memerlukan 2 (dua) kecermatan mendalam mengenai dua faktor berikut: *pertama*, kepemilikan dan kontrol publikasi; dan *kedua*, hubungan antara pemilik perusahaan media, jurnalis, dan pemegang kekuasaan.

Media dipandang sebagai pion dari kekuasaan negara, atau sebut saja sebagai aktor yang melayani negara (*servant of the state*). Kaitannya yang erat dengan kontrol dan sensor negara, dan pemahaman tentang bagaimana aspek media berfungsi dalam titik waktu tertentu, juga kecenderungannya untuk terlalu berpusat pada negara (*state-centric*). Media pada dasarnya memiliki karakter yang bermacam-macam dan jamak, terlihat dari kenyataan bahwa media cetak sering meliput tentang isu-isu politik. Seiring dengan kekuasaan negara yang semakin melemah di seluruh dunia, sensor dari negara menjadi semakin melemah pula.

Upaya untuk mempengaruhi muatan dan nada dari publikasi pemberitaan menjadi tidak selalu berkaitan dengan negara, namun oleh politisi oposisi, petinggi militer, pihak publik, pelobi, perusahaan, dan kelompok non pemerintah; dan pihak lain, semuanya terlibat di sini. Hal menarik untuk menjelaskan tentang konsep peran politik dari media adalah bab yang ditulis oleh pengamat Jepang, Susan Pharr³⁴, yang mengemukakan adanya 4 (empat) pandangan yang saling berlawanan, yaitu: *pertama* media sebagai penonton (*spectator*); *kedua*, sebagai penjaga (*watchdog*); *ketiga*, sebagai pelayan (*servant*); dan *keempat*, sebagai penipu (*trickster*). Pharr memandang media sebagai penipu, sebuah kosa kata yang dibuatnya sendiri. Menurutnya, penipu merupakan partisipan aktif dalam proses politik. Dampak utama dari peran penipu sebagai pembangun komunitas. Label penipu kemudian berubah menjadi kosa kata yang positif, yaitu mencerminkan perilaku media yang penuh dengan kebaikan. Perilaku media secara frekuentatif menampilkan sisi yang ambigu, hipokrit, dan inkonsisten, singkatnya mereka itu bersifat licin dan dan menipu. Menipu dalam konteks ini, meski dapat dipandang sebagai positif, tetapi juga mengandung sisi yang bersifat membahayakan dan destruktif.

Analisis media dari barat cenderung melihat hubungan partisan dalam konteks hubungan formal dan informal antara organisasi media dan partai politik, hubungan partisan harus dipahami sebagai rangkaian keseluruhan dari hubungan antar- praktisi, secara paralel dengan dunia media dan politik. Banyak literatur media di negara maju

³⁴https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_democracy/v011/11.2pharr.html diakses pada 28 Februari 2013

seperti kaum orientalis menekankan dominasi atau hegemoni kekuasaan negara, di mana media digunakan sebagai alat propaganda Negara.

Politik media merupakan sebuah sistem politik, politisi secara individual dapat terus menambah ruang privat dan publiknya, sehingga mereka tetap dapat mengurus masalah politik ketika ia tengah duduk di kursi kerjanya, yaitu melalui komunikasi yang bisa menjangkau masyarakat sarasannya melalui media massa. Hal ini berarti politisi media berdiri berlawanan dengan system yang lebih dulu ada, yakni politik partai. Dalam pengertian konvensional, politisi berupaya untuk memenangkan pemilihan umum dan dapat memerintah sebagai anggota tim partai. Dengan cara ini politik partai menjadi usang, tetapi sistem ini sekarang menjadi hal yang setidaknya tidaknya menjadi praktik politik yang umum dengan berbagi tanggung politik dengan politik media, sebagai sebuah sistem yang sedang menggejala dengan muatan - muatannya yang mulai dapat dipahami. Politik media merupakan sebuah sistem politik, istilah ini untuk membandingkannya dengan sistem-sistem lainnya, seperti politik legislatif, politik birokrasi, politik yudisia. Dalam setiap domain tersebut, dapat diidentifikasi peran kunci, kepentingan yang bermacam-macam, aturan perilaku yang rutin, serta politik interaksi yang mapan, yang bila digabungkan dapat memperjelas bentuk khusus dari perjuangan politik. Terdapat 3 (tiga) pelaku dalam politik media, ialah politisi, jurnalis, dan orang-orang yang digerakkan oleh dorongan (kepentingan) khusus. Bagi politisi, tujuan dari politik media adalah dapat menggunakan komunitas massa untuk memobilisasi dukungan publik yang mereka

perlu untuk memenangkan pemilihan umum dan memainkan program mereka ketika duduk di ruangan kerja.

Bagi jurnalis, tujuan politik media adalah untuk membuat tulisan yang menarik perhatian banyak orang dan menekankan apa yang disebutnya dengan “suara yang independen dan signifikan dari para jurnalis”. Bagi masyarakat, tujuannya adalah untuk keperluan mengawasi politik dan menjaga politisi agar tetap akuntabel, dengan menggunakan basis usaha yang minimal. Tujuan tersebut merupakan sumber ketegangan konstan yang ada di ketiga aktor tadi. Politisi menghendaki para jurnalis untuk bertindak sebagai pembawa berita yang netral dalam statemen mereka dan dalam rilis pers. Sementara para jurnalis tidak ingin menjadi tangan kanan pihak lain; mereka lebih berharap untuk bisa membuat kontribusi jurnalistik khusus untuk berita, dimana mereka dapat menyempurnakannya dengan menggunakan berita terkini, investigasi, dan analisis berita yang sangat dibenci oleh kalangan politisi. Masih dalam catatan saya tentang politik media, jurnalis menilai “suara jurnalistik”, paling tidak, sama besarnya dengan para pembaca dalam jumlah besar, dan para jurnalis ini sama sekali tidak ingin membantu politisi untuk menerbitkan berita mereka kepada publik. Jika jurnalis selalu saja melaporkan berita yang dikehendaki politisi, atau hanya melaporkan berita politik yang sesuai dengan keinginan pembaca, maka jurnalisme hanya akan menjadi profesi yang kurang menguntungkan dan kurang memuaskan bagi praktisinya, atau bahkan bukan lagi menjadi sebuah profesi.

Dan dikarenakan adanya kejenuhan pihak politisi dan para jurnalis yang bersaing untuk mendapatkan perhatian publik dalam pasar yang kompetitif, publik

cenderung mendapatkan bentuk komunikasi politik yang mereka inginkan. Namun ini tidak berlaku seluruhnya. Kepentingan yang telah melekat pada diri politisi untuk mengontrol muatan berita politik, berpadu dengan kepentingan jurnalis untuk membuat kontribusi yang independen dalam berita, akan menciptakan ketegangan dan distorsi yang cukup besar. Pendekatan untuk mempelajari politik media dalam buku ini terdiri dari dua poin utama. Pertama, seperti yang telah dibahas, ini akan berfokus pada kepentingan diri yang berbeda dari para partisipan dan bagaimana mereka membentuk sifat politik media. Ini merupakan titik awal yang dari kebanyakan studi tentang politik media, yang cenderung melihat politik media melalui prisma teoritis yang berbeda. Satu riset media yang besar berfokus pada nilai dan konvensi jurnalis, seperti kesenangan mereka untuk meliput persaingan politik ataupun kegiatan rutin dimana reporter mengatur kerja mereka. Poin penting dalam riset yang lain adalah penekanan pada sistem simbolik dari politik media, terutama dalam penciptaan ilusi, citra, dan kaca mata yang dapat menyamarkan gambaran realitas.³⁵

³⁵<http://www.belbuk.com/Komunikasi-Politik-Media-dan-Demokrasi-p-27543.html> diakses pada 28 Februari 2013

E. Contoh-Contoh Film, Novel dan Kartun Propaganda Atas Penghinaan

Nabi Islam

Beberapa peristiwa kontroversial dalam bentuk film, novel dan kartun yang menghina Islam

a. Novel The Satanic Verses

The Satanic Verses adalah novel keempat dari pengarang Salman Rushdie yang kelahiran Mumbai, India. Novel yang terbit pada 1988 ini memicu kontroversi, utamanya di Iran. Novel itu dinilai menggambarkan dan menyinggung kehidupan Nabi Muhammad dan proses turunnya Alquran secara tidak benar.

b. Film Submission

Film 'Submission' ini dirilis pada 2004, merupakan film pendek berdurasi 11 menit yang disutradarai Theo Van Gogh dan skenarionya ditulis Ayaan Hirsi Ali, mantan anggota parlemen Belanda. Film ini ditayangkan di jaringan TV publik Belanda (VPRO) pada 29 Agustus 2004.

c. Film kartun The Life of Muhammad

Film kartun 'The Life of Muhammad' dirilis April 2008, yang dibuat oleh politisi Belanda kelahiran dan keturunan Iran, Ehsan Jami. Film ini menceritakan kehidupan Nabi Muhammad dengan istrinya yang masih berusia 9 tahun, Aisyah

namun dalam sudut pandang seksual. Film itu juga menggambarkan wajah Nabi Muhammad, yang di dalam Islam, tidak diizinkan.

d. Kartun Nabi Muhammad di koran Jylland Posten Denmark

Pada September 2005, surat kabar Denmark, Jylland-Posten memuat kartun Nabi Muhammad yang menggambarkan wajah Nabi Muhammad. Selain itu digambarkan Nabi Muhammad memakai sorban lilit dengan sumbu bom di bagian atasnya.

e. Film Fitna

Film ini dirilis pada 2008 yang dibuat oleh anggota Parlemen Belanda, Geert Wilders. Film berdurasi 17 menit ini bercerita tentang Islam, tentang ayat-ayat Alquran dan potongan-potongan aksi terorisme yang dilakukan oleh umat Islam.